



**EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM
PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN
TUBAN**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Prasyarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata
2 (S2)
Pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi



DISUSUN OLEH:

**SAMIAN
22002091004**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2023**

ABSTRAK

Pengentasan kemiskinan merupakan keharusan bagi setiap Negara, hal ini karena kesejahteraan adalah salah satu proyeksi tertinggi pencapaian dari negara. Salah satu strategi pengentasan kemiskinan yang tergolong efisien yakni dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi, kualitas pendidikan, serta kesehatan namun dalam konteks ini fokus di Kabupaten Tuban.

Dari uraian tersebut, peneliti membagi kedalam beberapa rumusan masalah 1) bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban) Bgaimana evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban) bagaimana factor pendukung dan penghambat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban.

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan, evaluasi serta mengetahui factor-faktor yang ditimbulkan dari pelaksanaan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang menjelaskan kejadian-kejadian dalam pelaksanaan bantuan PKH. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan reduksi data, pemaparan dan kesimpulan dan keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan, evaluasi serta factor yang muncul masih bisa diatasi dan tergolong terlaksana yang mampu meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Tuban melalui bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Tuban.

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan (PKH), Pengentasan Kemiskinan, Kabupaten Tuban.

ABSTRACT

Poverty alleviation is a must for every country, this is because welfare is one of the highest aspirations of the state. One poverty alleviation strategy that is classified as efficient is the assistance of the Family Hope Program (PKH). which helps underprivileged communities in improving socio-economic conditions, quality of education, and health but in this context the focus is on Tuban Regency.

From this description, the researcher divides into several problem formulations 1) how is the implementation of the Family Hope Program (PKH) in alleviating poverty in Tuban Regency) How is the evaluation of the implementation of the Family Hope Program (PKH) in poverty alleviation in Tuban Regency) what are the supporting and inhibiting factors for the implementation of the Family Hope Program (PKH) in poverty alleviation in Tuban Regency.

The purpose of this study is to analyze the implementation, evaluate and find out the factors that arise from the implementation. The method used in this research is a qualitative approach with the type of case study research that explains events in the implementation of PKH assistance. The data source in this study uses primary and secondary data. Data analysis using data reduction, presentation and conclusion and the validity of the data using triangulation. The results in this study indicate that the implementation, evaluation and factors that arise can still be overcome and classified as implemented which can improve welfare in Tuban Regency through the assistance of the Family Hope Program (PKH) in Tuban Regency.

Keywords: Family Hope Program (PKH), Poverty Alleviation, Tuban Regency.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah Negara tentunya perludanya sebuah pembangunan, yang dimana merupakan sesuatu usaha yang di pelopori oleh negara supaya tujuan agar mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya. Di Negara Indonesia sendiri melakukan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat Indonesia. Perlu diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan nasional tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan setiap warga masyarakat Indonesia memiliki kewajiban sama untuk ikut serta dan berperan aktif dalam pembangunan nasional tersebut.

Pembangunan hakikatnya merupakan upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan berdasarkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai yang termaktub dalam alenia keempat dalam Pembukaan UUD Negara RI 1995 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahtraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan perdamaian abadi.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan pembangunan Desa menurut Undang-undang

Republik Indonesia Tahun 2014 yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, penanggulangan sarana dan prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Menurut Suharyanto, (2009:20) keberhasilan pembangunan dapat diukur dari terberantasnya pengangguran, terberantasnya kemiskinan, pemerataan hasil pembangunan dan hasil-hasilnya Berdasarkan pendapat para ahli tentang keberhasilan pembangunan nyatanya di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil karena angka pengangguran di Indonesia belum.

Dapat di berantas yang dapat berdampak pula dengan kemiskinan, imbas dari pengangguran yang akhirnya dapat mengurangi tingkat kemakmuran yang telah di capai seseorang karena tidak memiliki pendapatan.

Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK) di Kabupaten Tuban pada Maret 2021 mencapai 192,58 ribu jiwa. Jumlah ini meningkat 5,44 ribu orang, jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 yaitu 187,13 ribu orang. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tuban juga meningkat dari 15,91 persen pada Maret 2020 menjadi 16,31 persen pada Maret 2021. Garis Kemiskinan di Kabupaten Tuban Maret 2021 adalah Rp388.176,00 per kapita per bulan, meningkat sebesar Rp. 16.711,00 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 4,50 persen, jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 sebesar Rp 371.465,00. Pada Maret 2021, rata-rata rumah tangga miskin di Kabupaten Tuban memiliki 4,07 anggota keluarga. Jadi, besarnya Garis Kemiskinan per rumah rumah tangga miskin rata-rata adalah Rp. 1.579.876.32 per rumah tangga miskin. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Tuban Maret 2021

mengalami 3,26 meningkat 0,99 poin dibandingkan Maret 2020 sebesar 2,27. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Tuban Maret 2021 sebesar 0,86 meningkat 0,38 poin dibandingkan Maret 2020 sebesar 0,48.

Tabel 4.1
Kemiskinan di Kabupaten Tuban 2018-2021

Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tuban, 2015-2021



Sumber: BPS Kabupaten Tuban, Susenas 2021

Dengan naiknya angka kemiskinan kabupaten Tuban membuktikan bahwa keluarga tidak mampu dalam pemenuhan dasar, kebutuhan pendidikan merupakan imbas dari rendahnya penghasilan keluarga sangat miskin yang hanya cukup untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari dalam pemenuhan gizi anak kurang mencukupi produktivitas dan daya tahan tubuh sehingga menyebabkan anak tersebut terperangkap dalam kesehatan yang buruk. Seringnya tidak masuk sekolah karena sakit dapat menyebabkan anak putus sekolah atau setidaknya kurang berprestasi di sekolah. Ada juga sebagian dari anak-anak keluarga sangat miskin sama sekali tidak pernah mengenyam bangku sekolah karena harus membantu mencari nafkah. Rendahnya akses kesehatan keluarga pra sejahtera sehingga mengakibatkan anak tidak masuk sekolah, sakit-sakitan atau

stunting. Masih banyaknya keluarga pra sejahtera yang menikahkan anaknya dibawa umur ditengah himpitan ekonomi sehingga nikah dini menjadi solusi di tengah himitan kebutuhan ekonomi yang imbas dari dampak covid 19.

Dari permasalahan tersebut maka pemerintah diperlukan mengeluarkan program/kegiatan pembangunan yang didalamnya termuat tujuan pembangunan yang tertera pada UU Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) yaitu terwujudnya kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja

Untuk terus meningkatkan efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden telah mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8% sampai 10% pada akhir tahun 2014 yang dikelola oleh berbagai Kementerian dan Lembaga Pemerintah.

Terdapat empat strategi dasar yang telah ditetapkan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu menyempurnakan program perlindungan sosial, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan yang inklusif. Terkait dengan strategi tersebut,

pemerintah telah menetapkan instrumen penanggulangan kemiskinan yang dibagi berdasarkan klaster, yaitu program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga merupakan cakupan program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial dititikberatkan pada pemenuhan hak dasar utama.hak dasar utama tersebut memprioritaskan pada pemenuhan hak atas pangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta sanitasi dan air bersih. Dan jenis-jenis program sendiri dari jamkesmas, PKH BPNT, dan Bantuan Kartu Indonesia Pintar KIP.

Tujuan utama yang tertuang dalam buku pedoman PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok keluarga miskin, secara khusus tujuan PKH terdiri atas :

1. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)
2. Meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak RTSM
3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM
4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan khususnya bagi RTSM.

Dari hal tersebut, PKH pun mampu membawa perubahan untuk masyarakat miskin menjadi mampu perekonomiannya. Terlihat dari data jumlah peserta PKH di kabupaten Tuban yang menurun setiap tahunnya dari tahun 2008 sampai tahun 2015. Dari data jumlah peserta

PKH kabupaten Tuban peneliti mengambil salah satu kecamatan kabupaten Tuban yang dinilai sebagai kecamatan yang memiliki banyak jumlah peserta PKH nya dibanding dengan kecamatan lain, yaitu Kecamatan Bancar yang peserta PKH nya sebanyak 2.533 keluarga ditahun 2016.

Kemudian Di Kecamatan Bancar, PKH telah dilaksanakan ditahun 2008, dengan jumlah peserta sebanyak 2.533 keluarga dalam 16 kelurahan dan pendamping PKH sebanyak 14 orang, serta rumah KPM juga di tempeli labelisasi penerima Bansos. Dengan labelisasi belum mampu mengurangi penerima KPM PKH, sehingga KPM merasa biasa saja tidak ada rasa malu. Kemudian para pendamping ini setiap orangnya mengurus peserta PKH sekitar 300 keluarga. Selain dari hal tersebut, namun dalam pelaksanaan program Keluarga Harapan di kecamatan Bancar terdapat beberapa masalah yang dapat menghambat tercapainya tujuandari program Keluarga Harapan (PKH) itu sendiri. Pembaruan data yang belum tuntas sampai hari ini, masih ditemukan data KPM PKH yang meninggal serta mendapatkan Bantuan PKH. KPM yang mampu susah untuk di graduasi, serta KPM yang pindah tempat antar kabupaten/kota. seanjutnya proses validasi dan verifikasi yang belum sepenuhnya dilaksanakan, yang terjadi dilapangan yaitu pihak sekolah atau pihak puskesmas / posyandu merasa keberatan untuk melakukan verifikasi secara kontinyu. Yang kedua yaitu pencairan dana yang tidak tepat kepada RTSM, hal ini berhubungan dengan proses verifikasi, dikarenakan data yang perlukan lamban, maka pencairan dana pun jadi terhambat dan ikut telat. Yang ketiga kurangnya

koordinasi antar instansi pendukung, dan yang keempat data yang divalidasi dari SDM PKH sering tidak sinkron dengan data dari pusat.

Maka yang menjadi pembaruan dari penelitian-penelitian sebelumnya yakni menitik beratkan pada “Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di kabupaten di Kabupaten Tuban. dari penjelasan dan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Tuban”**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program keluarga harapan PKH dalam pengentasan kemiskinan di kabupaten Tuban?
2. Bagaimana evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan PKH dalam pengentasan kemiskinan di kabupaten Tuban?
3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan PKH dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan program keluarga harapan PKH dalam pengentasan kemiskinan di kabupaten Tuban?
2. Mengetahui evaluasi pelaksanaan program keluarga harapan PKH dalam pengentasan kemiskinan di kabupaten Tuban?
3. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program keluarga harapan PKH dalam pengentasan kemiskinan di kabupaten Tuban?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat teoritis dalam pengembangan ilmu administrasi dan kebijakan publik

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi masukan bagi pemangku kebijakan di kementerian Sosial di tahun berikutnya. Kemudian hasil penelitian ini nantinya juga dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti lain untuk pengembangan penelitian.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan hasil pembahasan berdasarkan temuan-temuan penelitian terkait, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam membantu pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban mampu berjalan dengan baik, hal ini tidak lepas dari peran stakeholder terkait, baik dalam mekanisme dan regulasi, actor yang terlibat, serta hasil dan monitoring yang menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan program PKH di Kabupaten Tuban tersebut mampu terlaksana dengan baik walupun masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam konteks tersebut supaya lebih optimal.
2. Evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam membantu pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban, dimana menggunakan beberapa tahapan guna melihat secara utuh pelaksanaannya tersebut, diantaranya: evaluasi tapan perencanaan (*ex-ante*), evaluasi tahap implementasi, serta evaluasi tahap pasca imlementasi (*ex-post*) bahwa dalam evaluasi ini dilakukan secara berkala supaya penanganan permasalahan dapat terselesaikan dengan cepat, tanggap dan mampu dirasakan langsung oleh para penerima manfaat bantuan PKH di masing-masing daerah khususnya Kabupaten Tuban yang mampu melaksanakannya dengan baik dan mampu mengentaskan kemiskinan walaupun kemiskinan di Kabupaten Tuban yang tergolong tinggi di Jawa Timur.
3. Faktor pendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban ini hal yang ungen yakni pendanaan yang sesuai dengan pusat dan pencairannya juga sesuai dengan periodiknya selain itu komunikasi serta birokrasi di Kabupaten Tuban juga sangat memperhatikan mengenai hal terkait dan untuk factor

penghambat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban pada dasarnya sudah baik namun ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam kordinasi yang kurang khususnya dalam sensus penduduk, perencanaan program PKH, serta ketepatan pelayanan PKH yang pada dasarnya juga mampu diatasi dengan baik.

B. Saran

1. *Pemerintah*, sebagai penentu kebijakan pada konteks ini tergolong sudah sesuai dengan peraturan yang ada namun perlu adanya koordinasi yang lebih baik supaya salah satu program dari pemerintah khususnya bantuan PKH ini benar-benar terlaksana dan tepat sasaran kepada orang yang lebih berhak mendapatkan bantuan.
2. *Pendamping PKH*, saling koordinasi dengan baik antar pendamping karena perlu adanya teknis yang baik dan diringi dengan inisiatif supaya mampu melaksanakan tugas dengan baik secara keseluruhan oleh para pendamping PKH di masing-masing tempat.
3. *PKM*, mampu memanfaatkan dana dengan bijak supaya apa yang telah menjadi proyeksi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Tuban

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bakri, Riani dkk. 2020. Policy Implementation of The Hope Family Prgram in The Bone Regency. *Jurnal Pallagga Praja* Vol. 2 No. 2
- Departemen Sosial RI. (2009). Pedoman Umum PKH 2009. Jakarta: Tim Penyusun Pedoman Umum PKH Lintas Kementrian dan Lembaga
- Desrinelti dkk. 2021. Kebijakan Publik: Konsep Pelksanaan. JRTI: *Jurnal Riset Tindakan Indonesia* Vol. 1 No. 3
- Diansari, R. E. (2016). *Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Studi pada Desa Pateken Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung Jawa Tengah*. Jogyakarta: Universitas PGRIYogyakarta.
- Fajri, Amelia Kurnia dkk. 2022. Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik* Vol. 7 No. 1
- Indawan. 2019. Efektivitas Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan Kemiskinan pada Kementerian Sosial Republik Indonesia (Studi Kasus di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur). *Jurnal Simplex* Vol. 2 No. 3
- Nanggolan, Tiogiaratua dkk. 2012. *Program Keluarga Harapan di Indonesia: Dampak pada Rumah Tangga Sangat Miskin di Tujuh Provinsi*. Jakarta: P3KS Press
- Salim, Gendro. 2014. *Effective Coaching*. Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer
- Sujono, Adi. 2015. Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan atau Aturan terhadap Pelayanan Sektor Publik di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik* Vol. 4 No. 2

Dokumen-dokumen:

Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Dye, Thomas R, 2006. *Understanding Public Policy*. United States of America

Kementrian Sosial, (2020) *Mekanisme Pelaksanaan PKH tahun 2020*. Jakarta : Perlindungan Sosial RI

Kementrian Sosial, (2020). *Buku Panduan Pendampingan PKH tahun 2020*. Jakarta : Perlindungan Sosial RI

Kementrian Sosial, (2020). *Buku Panduan PKH tahun 2020*. Jakarta : Perlindungan Sosial RI

Lintjewas, O., Tulus, F., & Egetan, M. (2016). *Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan di Kabupaten Minahasa Selatan*.

Nugroho 2014., *Public Policy*., Yogyakarta: UGM Press.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 2014 Tentang desa*. Jakarta: Kementrian RI

Republik Indonesia. *Undang-Undang 1998*

Sugiyono, (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Suharto Edu, (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Suharyanto, S., & Sofianto, A. (2009). *MODEL PEMBANGUNAN DESA TERPADU INOVATIF DI JAWA TENGAH*. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*.

UU No. 11 Tahun (2009) tentang Kesejahteraan sosial Pres No.15 Tahun 2011 tentang Percepatan Penanganan Kemiskinan.



Winarno 2007. Kebijakan Publik, Teori, dan Proses. Jakarta: Media Pressindo.

Sumber Jurnal

<https://media.neliti.com/media/publications/155998-ID-evaluasi-kebijakan-program-keluarga-hara.pdf>

<file:///C:/Users/yu/Downloads/3275-12305-1-PB.pdf>

